

**PERLAKUAN BANK MUAMALAT INDONESIA TERHADAP
PEMBAYARAN KLAIM MUSNAHNYA BARANG JAMINAN DEBITUR
OLEH PIHAK ASURANSI**

Sigit Somadiyono, SH., MH¹

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap perlakuan Bank Muamalat Indonesia terhadap pembayaran klaim musnahnya barang jaminan debitur oleh pihak asuransi. Obyek dari penelitian ini adalah perlakuan Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini menggunakan perjanjian pembiayaan tahun 2016 yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang klaim yang dibayarkan oleh pihak asuransi atas musnahnya barang jaminan digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia untuk membayar dan/atau melunasi sisa pokok dan margin pembiayaan Nasabah Pembiayaan (debitur)

Kata Kunci : Bank Muamalat Indonesia, Klaim, Musnahnya Jaminan, Asuransi

A. LATAR BELAKANG

Dalam dunia usaha, peranan lembaga keuangan sangatlah penting. Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank atau non bank. Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank umum terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Hermansyah mengemukakan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta

¹ Penulis adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.² Artinya, kegiatan dalam perbankan memiliki cakupan yang luas, yaitu mencakup lembaga, kegiatan usaha, cara dan proses.

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit diperlukan adanya jaminan atau agunan. Tujuan dari adanya jaminan atau agunan adalah untuk menutup risiko, agar debitur bertanggungjawab melunasi hutangnya dan apabila debitur tidak membayar hutangnya, maka kreditur tidak mengalami kerugian karena memiliki jaminan. Artinya, ketika debitur meminjam uang/berhutang, ia harus menjaminkan sesuatu sebagai agunan/jaminan atas hutang yang ia pinjam.

Pihak bank selaku kreditur tentunya tidak mengharapkan adanya suatu kerugian yang muncul akibat musnahnya barang jaminan. Maka dari itu, untuk meminimalisir risiko kerugian, pihak bank mewajibkan para debiturnya untuk mengasuransikan barang yang menjadi jaminan. Dalam perjanjian asuransi terdapat suatu klausula yang disebut sebagai *banker's clause*. Berdasarkan penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, *banker's clause* merupakan klausula yang memberikan hak kepada Bank untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim. Sehingga apabila terjadi pembayaran atas klaim yang diajukan oleh nasabah dikarenakan musnahnya barang jaminan, maka yang menerima uang adalah pihak bank.

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk sebagai bank pertama yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam di Indonesia, sejak tahun 1991 dan telah memulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 1 Mei 1992 (27 Syawal 1412 H) tentu telah mempunyai banyak pengalaman dibandingkan dengan perbankan syariah lainnya yang baru bermunculan di Indonesia sejak

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2005, hlm. 18.

krisis multidimensi pada tahun 1997. Hal itu menjadi dasar penulis untuk mengambil objek penelitian tentang bagaimana bank khususnya bank syariah dalam perlakuan terhadap pembayaran klaim musnahnya jaminan debitur oleh pihak asuransi.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perlakuan Bank Muamalat Indonesia terhadap pembayaran klaim musnahnya jaminan debitur oleh pihak asuransi ?
2. Bagaimanakah implikasi yuridis terhadap jaminan pembiayaan yang jaminannya musnah di Bank Muamalat Indonesia ?

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Hukum Jaminan Kredit

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidesstelling*, *zekerheidsrechten* atau *security of law*. Sehubungan dengan pengertian hukum jaminan, tidak banyak literatur yang merumuskan pengertian hukum jaminan. Menurut J. Satrio, hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Ringkasnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.³ Definisi ini difokuskan pada pengaturan pada hak-hak kreditur semata-mata, tetapi juga erat kaitannya dengan debitur. Sedangkan yang menjadi objek kajiannya adalah benda jaminan.

Menurut M. Bahsan, hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang

³ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 3

piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.⁴

Sementara itu, Salim HS memberikan perumusan hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.⁵

Unsur-unsur yang tercantum di dalam definisi ini adalah:⁶

- a. Adanya kaidah hukum
- b. Adanya pemberi dan penerima jaminan
- c. Adanya jaminan
- d. Adanya fasilitas kredit

Jaminan merupakan kebutuhan kreditur untuk memperkecil risiko apabila debitur tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan kredit yang telah dikururkan. Dengan adanya jaminan apabila debitur tidak mampu membayar maka debitur dapat memaksakan pembayaran atas kredit yang telah diberikannya.⁷

Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menetapkan bahwa segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Dengan demikian, segala harta kekayaan debitur secara otomatis menjadi jaminan manakala orang tersebut membuat perjanjian utang meskipun tidak dinyatakan secara tegas sebagai jaminan. Terhadap jaminan ini akan timbul

⁴ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 3.

⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 6

⁶ *Ibid*, hlm. 7-8

⁷ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 67

masalah manakala seorang debitur memiliki lebih dari seorang kreditur di mana masing-masing kreditur menginginkan haknya didahulukan.

Hukum mengantisipasi keadaan demikian dengan membuat jaminan yang secara khusus diperjanjikan dengan hak-hak istimewa seperti hak tanggungan, fiducia, gadai, maupun cession piutang. Kreditur yang memegang hak tersebut memiliki hak utama untuk mendapatkan pembayaran kredit seluruhnya dari hasil penjualan benda jaminan. Apabila terdapat kelebihan dalam penjualan benda jaminan tersebut dapat diberikan kepada kreditur lain.

Eksistensi adanya perjanjian penjaminan tergantung pada perjanjian pokok. Perjanjian pokok biasanya berupa perjanjian kredit. Perjanjian penjaminan tidak mungkin ada tanpa perjanjian kredit. Apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian penjaminan akan berakhir pula. Dasar hukum jaminan dalam pemberian kredit adalah Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan yang menyatakan bahwa :

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Jaminan pemberian kredit menurut Pasal 8 ayat (1) adalah bahwa keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Di dalam KUHPdata tercantum beberapa ketentuan yang dapat digolongkan sebagai hukum jaminan. Hukum jaminan dalam ketentuan hukum KUHPdata adalah sebagaimana yang terdapat pada Buku Kedua yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga

jaminan (Gadai dan Hipotek) dan pada Buku Ketiga yang mengatur tentang penanggungan utang adalah sebagai berikut:⁸

1. Prinsip-prinsip Hukum Jaminan (Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdato).
2. Gadai (Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdato).
3. Hipotek (Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUHPerdato dan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan,).
4. Penanggungan Utang (Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdato)

2. Hubungan Perjanjian Kredit dengan Jaminan

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.⁹ Dengan melihat bentuk perjanjiannya, perjanjian kredit merupakan perjanjian khusus karena di dalamnya terdapat kekhususan, dimana pihak kreditur adalah pihak bank sedangkan objek perjanjian adalah uang. Perjanjian kredit ini dibuat secara tertulis, tujuannya ialah untuk bukti lengkap mengenai apa yang mereka perjanjikan.¹⁰

Sebelum mengajukan kredit, seorang calon debitur haruslah terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kredit. Setelah permohonan kredit calon debitur dianggap layak untuk disetujui, bank akan memberikan tanda persetujuannya yang disebutnya Sebagai Surat Persetujuan Prinsip, yaitu

⁸ M. Bahsan, *Op.Cit*, hlm. 9

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2003, hlm. 122

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 226.

surat kepada pemohon yang memberitahukan setuju secara prinsip pemberian kredit.¹¹

Pemberian Kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada anggota masyarakat yang umumnya disertai dengan penyerahan jaminan kredit oleh debitur (peminjam). Terhadap penerimaan jaminan kredit tersebut terkait dengan berbagai ketentuan hukum jaminan.¹²

Banyak hal mengenai perjanjian kredit yang dapat dikaitkan dengan ketentuan hukum jaminan. Salah satu contoh adalah tentang penerapan ketentuan Pasal 1131 KUHPdata yang mengatur tentang kedudukan harta seorang yang berutang untuk menjamin utangnya. Bank pemberi kredit hendaknya sepenuhnya memahami dan mematuhi ketentuan Pasal 1131 KUHPdata tersebut untuk mengamankan kepentingannya sebagai pihak yang berpiutang. Harta calon debitur adalah semua hartanya yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sepenuhnya merupakan jaminan atas kredit yang bersangkutan.

3. Tinjauan Umum Objek Asuransi

Objek asuransi erat hubungannya dengan teori kepentingan yang secara umum dikenal dalam hukum asuransi. Menurut teori kepentingan, pada objek asuransi melekat hak subjektif yang tidak berwujud. Karena objek asuransi dapat rusak, hilang, musnah atau berkurang nilainya, maka hak subjektif juga dapat rusak, hilang, musnah atau berkurang nilainya. Dalam literatur hukum asuransi, hak subjektif ini disebut kepentingan. Kepentingan bersifat absolut, artinya harus ada pada setiap objek asuransi dan mengikuti kemana saja benda asuransi itu berada. Kepentingan itu harus

¹¹ H. R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 133.

¹² M. Bahsan, *Op. Cit*, hlm. 70

sudah ada pada objek asuransi pada saat asuransi diadakan atau setidaknya tidaknya pada saat terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian.

Objek asuransi adalah harta kekayaan. Karena kepentingan itu melekat pada objek asuransi, maka kepentingan juga adalah harta kekayaan. Sebagai harta kekayaan kepentingan memiliki unsur-unsur bersifat ekonomis. Menurut Pasal 268 KUHD, asuransi dapat mengenai segala macam kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, diancam oleh bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung, karena asuransi dapat berjalan atau risiko dapat dialihkan dari tertanggung kepada penanggung apabila tertanggung telah membayar premi kepada penanggung/perusahaan asuransi tersebut.¹³

Maka dapat dipahami bahwa premi asuransi merupakan syarat mutlak untuk menentukan perjanjian asuransi dilaksanakan atau tidak. Penetapan tingkat premi asuransi harus didasarkan pada analisis perhitungan yang sehat. Besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung ditentukan berdasarkan penilaian risiko yang dipikul oleh penanggung.

D. PEMBAHASAN

1. Perlakuan Bank Muamalat Indonesia Terhadap Pembayaran Klaim Musnahnya Jaminan Debitur Oleh Pihak Asuransi.

Dalam pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia, ada beberapa asuransi yang harus ditanggung si pengambil kredit atau nasabah pembiayaan yaitu:

- a. Asuransi jiwa memproteksi resiko kegagalan dalam membayar akibat kematian selama masa angsuran.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 103

- b. Asuransi kerugian atau kebakaran atau kendaraan untuk memproteksi jaminan yang diberikan debitur kepada bank.
- c. Untuk beberapa kasus dimana nasabahnya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai swasta yang berstatus pegawai tetap dimana jaminannya hanya berupa Surat Keputusan (SK) dan/atau kuasa potong gaji dari bendahara serta asuransi yang digunakan adalah Asuransi Kredit.

Pada objek jaminan pembiayaan yang diberikan Bank Muamalat Indonesia, setiap polis asuransi selalu ada *bankers clause* yang diikuti nama pemilik jaminan (debitur), misalnya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk QQ (Nama Debitur).

Pasal 15 ayat (9) contoh kontrak perjanjian (akad pembiayaan) produk berbasis Akad Musyarakah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjabarkan bahwa setiap polis asuransi harus memuat *Banker's clause* yakni bahwa selama harta benda yang diasuransikan masih merupakan jaminan atas pengembalian modal pembiayaan Nasabah kepada Bank, uang pertanggungan yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi akan diserahkan langsung kepada Bank dan selanjutnya diperhitungkan terkait kewajiban Nasabah kepada Bank. Jika masih ada sisa, sisa tersebut diserahkan kepada Nasabah dan atau Penjamin sebagai pemilik harta benda yang dijaminkan kepada Bank. Ayat (10) menambahkan Apabila uang pertanggungan tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban, sisa kewajiban tersebut tetap menjadi kewajiban Nasabah kepada Bank.¹⁴

Berdasarkan perjanjian pembiayaan antara nasabah dengan Bank Muamalat Indonesia, telah terjadi kesepakatan antara Bank Muamalat Indonesia dengan tetanggung (nasabah pembiayaan) bahwa apabila terjadi kerusakan atau kehilangan dan musnahnya pada apa yang

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016, hlm. 269

dipertanggungjawabkan, pembayaran klaim akan diserahkan pihak asuransi kepada pihak Bank Muamalat Indonesia yang kemudian digunakan untuk melakukan pembayaran pelunasan ataupun pelunasan sebagian terhadap hutang pokok kredit ditambah bunga dan biaya-biaya lain tanpa mengurangi hak tertanggung atas kelebihan jumlah ganti rugi.

Apabila terjadi peristiwa yang menyebabkan musnah atau hilangnya barang jaminan, debitur selaku pemilik melaporkan peristiwa tersebut kepada Bank Muamalat Indonesia, kemudian Bank Muamalat Indonesia meneruskan laporan tersebut ke pihak asuransi. Setelah semua berkas yang diperlukan lengkap, tidak lebih dari 14 hari kerja setelah klaim disetujui, uang akan masuk ke rekening angsuran debitur yang jaminannya musnah atau hilang. Bank Muamalat Indonesia akan memberikan informasi kepada nasabah kalau uang klaim telah masuk kerekening nasabah dan dilakukan *hold* (tahan) uang tersebut didalam rekening nasabah oleh Bank Muamalat Indonesia agar nasabah tidak melakukan penarikan.

Account Manager Bank Muamalat Indonesia kemudian melakukan tahapan proses pelunasan dipercepat dengan meminta putusan dari komite pembiayaan untuk menentukan jumlah nilai pokok dan margin yang diambil untuk pelunasan pembiayaan. Apabila dana dari uang klaim tersebut bisa melunasi, maka pembiayaan debitur telah selesai di Bank Muamalat Indonesia. Apabila dana dari klaim tersebut tidak mencukupi melakukan pelunasan seluruhnya, maka dimintakan putusan dari komite tentang sisa plafond dan apakah perlu dimintakan jaminan tambahan atau tidak. Setelah ada putusan komite pembiayaan mengenai pelunasan sebagian, selanjutnya akan dilakukan adendum terhadap akad pembiayaan dan dikeluarkan jadwal angsuran yang baru.

2. Implikasi Yuridis Terhadap Jaminan Pembiayaan Yang Jaminannya Musnah Di Bank Muamalat Indonesia

Perlindungan hukum merupakan bentuk bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak-hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

Hukum memiliki fungsi untuk mengatur hubungan antara negara dengan masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan sesama masyarakat, agar terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib. Hal tersebut menuntut hukum agar menciptakan suatu kepastian hukum dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. kepastian hukum mengharuskan terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat, maka kaidah dimaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.¹⁶

Akibat dari musnahnya barang jaminan yang diasuransikan dengan *banker's clause* adalah pihak asuransi akan membayarkan klaim atas asuransi jaminan debitur kepada pihak bank dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia. Dan Bank Muamalat Indonesia akan menggunakan uang tersebut untuk melakukan pelunasan terhadap pembiayaan debitur yang tersisa. Jika masih ada jumlah yang tersisa maka dapat diserahkan kepada debitur

Jumlah uang yang diterima debitur sebagai ganti kerugian adalah sebesar nilai klaim asuransi dalam polis asuransi dikurangi sisa kredit debitur pada bank. Sisa pembayaran kredit itulah yang kemudian diberikan kepada debitur sebagai suatu bentuk perlindungan hukum.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993, hlm. 34

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Binacipta, 1983, hlm. 15

Jika klaim asuransi tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa kredit debitur, Penyebab terjadinya kekurangan pembayaran terhadap klaim asuransi musnahnya objek jaminan yang diasuransikan adalah:

- a. Kerusakan yang ditimbulkan kurang dari 100% (seratus persen) sehingga hanya dibayarkan sebagian dari total nilai klaim;
- b. Nilai premi yang dibayarkan tidak sesuai dengan nilai tanggungan yang semestinya;
- c. Sisa pembiayaan yang masih tinggi dan tidak sesuai dengan besaran klaim akibat kredit macet.

Dampak dari kurangnya pembayaran klaim terhadap plafond pembiayaan debitur di Bank Muamalat Indonesia adalah potensi debitur untuk melakukan wanprestasi. Potensi wanprestasi yang dilakukan debitur bisa disebabkan karena:

- a. Objek jaminan yang musnah tersebut adalah sumber untuk pembayaran pembiayaan;
- b. Nasabah pembiayaan beranggapan bahwa tidak perlu melakukan pembayaran lagi dikarenakan sudah dilunasi oleh pihak asuransi;
- c. Keuangan nasabah menjadi terganggu dikarenakan harus membangun ataupun membeli kembali objek jaminan yang musnah tersebut.

Implikasi yuridis terhadap objek jaminan yang musnah pada objek jaminan pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia adalah:

- a. Perubahan/adendum pada perjanjian pembiayaan antara Bank Muamalat Indonesia dengan debitur pembiayaan, antara lain:
 - 1). Jangka waktu pembiayaan dimana waktu pembiayaan menjadi lebih pendek dari pada yang semestinya.
 - 2). Nilai angsuran menjadi berubah apabila dilakukan penyesuaian terhadap pelunasan sebagian akibat pembayaran klaim yang tidak sesuai dengan besaran plafond dan margin pembiayaan.

- 3). Jaminan pembiayaan menjadi berubah apabila nasabah pembiayaan masih memiliki plafond pembiayaan yang nilainya sangat besar dari pada klaim asuransi.
- b. Bank Muamalat Indonesia kehilangan margin yang diharapkan dari pembiayaan dikarenakan adanya potongan terhadap margin karena pelunasan dipercepat dan adanya potensi pembiayaan bermasalah apabila klaim yang diterima tidak sebesar plafond dan margin pembiayaan.
- c. Debitur pembiayaan kehilangan hak harta bendanya berupa :
 - 1). Hak milik kendaraan apabila barang tersebut rusak lebih dari 75% dan atau hilang karena tindak pidana pencurian.
 - 2). Penundaan terhadap hak menikmati rumah atau bangunan yang musnah karena gempa bumi atau kebakaran.
 - 3). Kehilangan sumber mata pencarian, objek jaminan pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia bisa tetap digunakan untuk diambil manfaatnya sebagai sumber mata pencarian.

Untuk mencegah agar sisa plafond pembiayaan tersebut masih bisa terselamatkan, dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*),

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Perlakuan Bank Muamalat Indonesia terhadap pembayaran klaim musnahnya jaminan debitur oleh pihak asuransi adalah dipergunakan

untuk membayar sisa pokok dan margin terhadap pembiayaan yang diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia kepada debitur yang jaminannya musnah. Apabila nilai klaim tersebut belum dapat melunasi pembiayaannya, maka Bank Muamalat Indonesia untuk menghindari terjadinya wanprestasi dari nasabah akan melakukan langkah-langkah penyelamatan kredit bermasalah.

- b. Implikasi yuridis terhadap jaminan pembiayaan yang jaminannya musnah di Bank Muamalat Indonesia adalah terhadap perjanjian pembiayaan dimana terjadi perubahan terkait waktu pembiayaan yang dikarenakan musnahnya barang jaminan tersebut waktu pembiayaan menjadi lebih cepat dari waktu semestinya dan juga terkait dengan besaran angsuran dikarenakan adanya pelunasan sebagian akibat musnahnya objek jaminan.

2. Rekomendasi

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Perlunya transparansi nilai pertanggungan dari jaminan yang diasuransikan sehingga nasabah memahami nilai ganti rugi yang akan diterimanya apabila jaminan tersebut musnah ataupun hilang.
- b. Debitur pembiayaan harus lebih proaktif dalam meminta penjelasan terhadap risiko yang akan dihadapi apabila jaminan pembiayaan tersebut musnah atau hilang sehingga tidak terjadi kesalahpahaman tentang perlakuan terhadap jaminan pembiayaan yang musnah atau hilang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Badriyah Harun, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- H. R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- J. Satrio, 2007, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Bahsan, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2016, *Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Salim HS, 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bandung: Binacipta.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa.